

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Berbagai kajian di banyak negara menunjukkan kuatnya hubungan antara pendidikan (sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia) dengan tingkat perkembangan bangsa-bangsa tersebut yang ditunjukkan oleh berbagai indikator ekonomi dan sosial budaya. Pendidikan yang mampu memfasilitasi perubahan adalah pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakatnya.

Sekolah sebagai lembaga formal yang melaksanakan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bekerja keras, berbudi luhur, berdisiplin, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil, sehat jasmani dan rohani.

Kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negeri dan hal yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia merupakan hal-hal yang harus segera ditanggapi dan dipertimbangkan. Sekolah merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat oleh karena itu segala bentuk tujuan sekolah kesemuanya harus di arahkan kepada pembentukan corak pribadi dan kemampuan warga masyarakat sebagaimana yang menjadi target atau sasaran

pendidikan di masyarakat bersangkutan. Lembaga pendidikan, khususnya sekolah, hendaknya tidak mengabaikan kegiatan hubungan dengan masyarakat, karena Aktivitas pendidikan telah dimulai semenjak seorang individu pertama kali berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Sehingga pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat. Kegiatan tersebut dikenal dengan hubungan masyarakat atau humas (*public relations*).

Undang-Undang No.25 tahun 2000 tentang propenas pada butir 4 disebutkan perlunya peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Upaya tersebut antara lain pemerintah membentuk komite sekolah dan dewan pendidikan, dengan tujuan utama ikut meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Komite sekolah merupakan suatu wadah yang memiliki fungsi dan peran untuk menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu partisipasi komite sekolah dapat dikatakan sebagai suatu proses penyaluran aspirasi masyarakat baik yang bersifat dukungan material maupun non material dari seluruh anggota dan kepengurusannya, baik secara individual maupun secara bersama-sama, secara langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, pelaksanaan, serta pengawasan/pengevaluasian pendidikan demi kemajuan mutu sekolah dibentuknya komite sekolah dimaksudkan sebagai wadah pemberdayaan peran serta masyarakat. Komite sekolah merupakan mitra sekolah dalam upaya membangun komitmen dan kepatuhan serta kepedulian masyarakat terhadap peningkatan kualitas sekolah.

Keberadaan komite sekolah senantiasa bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai dengan posisi dan otonomi yang ada.

Selama ini penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia terbatas pada keikutsertaan Anggota masyarakat dalam implementasi atau penerapan program-program pembangunan. Hal ini dipahami sebagai pengarahan untuk kepentingan pemerintah dan negara. Dalam implementasi partisipasi masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah namun harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri dengan kepentingan mereka.

Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan ketepatan pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Komponen sekolah terdiri dari kepala sekolah dan dewan guru, orang tua siswa, dan masyarakat.

Adapun peran yang dijalankan komite sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Badan ini juga berperan sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Di samping itu, komite sekolah juga berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran

pendidikan di satuan pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut: (1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. (2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

Mengacu pada kondisi nyata di lapangan, kehadiran komite dapat memberikan informasi dan menyampaikan ide (gagasan) agar masyarakat mengetahui tujuan dan kegiatannya, sehingga masyarakat dapat terlibat dalam memberikan bantuan dana, pembuatan gedung dan membicarakan kemajuan belajar. Komite sekolah juga membantu pimpinan mengembangkan rencana dan kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat agar ada komunikasi timbal balik dengan pihak luar karena hal itu menumbuhkan harapan dan penyempurnaan kebijaksanaan atau kegiatan yang telah dilakukan organisasi. Kesatuan sosial dalam hal Komite Sekolah adalah masyarakat sekolah yang peduli pendidikan yang berinteraksi satu sama lain. Banyak hal yang bisa di sumbangkan dan dilakukan oleh masyarakat untuk membantu terlaksananya pendidikan yang bermutu, misalnya keikutsertaan dalam pengambilan keputusan.

Keterikatan yang terus-menerus berarti masyarakat secara sadar merasa terikat dengan sekolah karena mereka peduli dengan pendidikan. Komite sekolah juga memiliki tujuan, dan tujuan utamanya adalah meningkatkan mutu pembelajaran di satuan pendidikan tersebut, sehingga dihasilkan lulusan yang bermutu ditinjau dari aspek akademik dan non-akademik. Adapun fungsi komite di sekolah tersebut adalah: (a) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. (b) melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. (c) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. (d) mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan. (e) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. (f) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, di satuan pendidikan.

Respon yang timbul dikalangan masyarakat sebagai feedback harus mendapat perhatian sepenuhnya. Respon masyarakat dapat berbentuk saran, pendapat, kritik, keluhan dan pertanyaan. Semua respon itu harus disaring agar dapat digunakan untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan sekolah.

Oleh karena itu, pemberlakuan manajemen berbasis kompetensi membawa keterlibatan kepada sekolah tidak menjadi subordinat lagi dari pemerintah maupun yayasan, tetapi bersifat otonom. Pendekatanpun tidak birokratis lagi,

melainkan profesional. Ruang gerak para guru dan kepala sekolah menjadi lebih luas dan leluasa, termasuk dalam mengelola anggaran pendidikan disekolah. Adanya keleluasaan gerak kepala sekolah dalam mengelolah anggaran tersebut menyebabkan peranan komite sekolah menjadi besar dan memiliki peran yang tinggi. Sebab, semua keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan selalu memberdayakan semua pihak (*stakeholder*).

Salah satu cara mengatasi masalah tersebut adanya hubungan sekolah dan masyarakat sehingga, sekolah dapat mengetahui sumber-sumber yang ada dalam masyarakat kemudian di dayagunakan untuk kepentingan kemajuan anak di sekolah. Di pihak lain, masyarakat juga turut mengenyam dan menyerap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh sekolah. Masyarakat dapat mengerti dan memahami tujuan pendidikan, kebutuhan-kebutuhan pendidikan, pelaksanaan pendidikan, dan kemajuan pendidikan yang berlangsung di sekolah tersebut. Berangkat dari pemahaman tersebut, masyarakat dapat memberikan bantuan kepada sekolah demi kemajuan pendidikan anak-anaknya.

Terdorong keinginan untuk membantu memperluas cakrawala pandangan para pendidik dan calon pendidik termasuk para penyelenggara sekolah mengenai peran komite, maka peneliti berinisiatif untuk mengangkat obyek tersebut sebagai bahan kajian penulisan skripsi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah :

1. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penguatan otonomi sekolah di Sekolah Dasar Negeri 3 Bulontio Timur.
2. Peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam penguatan otonomi sekolah di Sekolah Dasar Negeri 3 Bulontio Timur.
3. Peran komite sekolah sebagai mediator (*eksekutif*) dalam penguatan otonomi sekolah di Sekolah Dasar Negeri 3 Bulontio Timur.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penguatan otonomi sekolah di Sekolah Dasar Negeri 3 Bulontio Timur.
2. Untuk mendeskripsikan Peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam penguatan otonomi sekolah di Sekolah Dasar Negeri 3 Bulontio Timur.
3. Untuk mendeskripsikan Peran komite sekolah sebagai mediator (*eksekutif*) dalam penguatan otonomi sekolah di Sekolah Dasar Negeri 3 Bulontio Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi sekolah, sebagai bahan informasi bahwa komite ikut berperan dalam penguatan otonomi sekolah.
2. Bagi komite, agar lebih meningkatkan penyaluran aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan.
3. Bagi siswa, dengan adanya partisipasi komite sekolah siswa diharapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar.
4. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan peneliti tentang peran komite sekolah dalam penguatan otonomi sekolah, dapat menambah pengetahuan penelitian lebih lanjut.